



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



Program Prioritas Kementerian ESDM

Tahun 2025





OUTLINE

I. Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2024

II. Program Strategis/Prioritas TA 2025





I.

Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2024



Kinerja Sektor ESDM Tahun 2024

➤ **PNBP Melebihi Target**
Rp 269,5 Triliun
115% dari target Rp 234,2 Triliun

➤ **Investasi Tetap Terjaga**
USD 32,3 miliar
Meningkat 8% dari tahun 2023
sebesar USD29,9 miliar

➤ **Realisasi Anggaran**
97,07%
Rp6,91 T dari DIPA Rp 7,12 T

SPKLU: Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
SPBKLU: Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum
RUED: Rencana Umum Energi Daerah

Subsektor MIGAS

Lifting Minyak Bumi



579,7 MBOPD
91,7% dari target
660 MBOPD

Lifting Gas Bumi



1.026,7 MBOEPD
93,34% dari target
1.100 MBOEPD

Jaringan Gas



950,71 Ribu SR
Realisasi 2023: 60,33 Ribu SR

BBM Satu Harga



Kumulatif 583 Lokasi
Tambahan 71 Lokasi

Pipa Cirebon-Semarang



Fase I: Semarang – Batang
(62 KM) - Selesai

Konkit Nelayan



15.000 Paket

Konkit Petani



13.000 Paket

Subsektor LISTRIK & EBTKE

Rasio Elektrifikasi



99,82%

Pembangkit EBT



14.325 MW
(Target 14.090 MW)
Penambahan 1.114,7 MW

Biodiesel



13,16 Juta KL
(Target 11,3 Juta KL)
Menghemat devisa
Rp147,5 triliun

Kendaraan Listrik



KBLBB
SPKLU dan *Private Charging*
Station : 3.202 Unit
SPBKLU: 1.902 Unit

Penetapan RUED

- telah ditetapkan 33 Perda RUED Provinsi.
- 1 provinsi sedang melakukan pembahasan ranperda RUED dengan DPRD yaitu Papua.
- 1 provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) telah Menyusun draft dokumen RUED yaitu Papua Tengah.
- 3 provinsi yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pengunungan belum Menyusun Perda RUED karena DOB.

Subsektor MINERBA

Produksi & DMO Batubara



- Produksi: 836 juta ton** atau 117% dari target 710 juta ton
- DMO: 233 juta ton** atau 129% dari target 181 juta ton



7 Smelter

Penambahan s.d. 2024
Dari target 9 smelter terintegrasi

Subsektor GEOLOGI

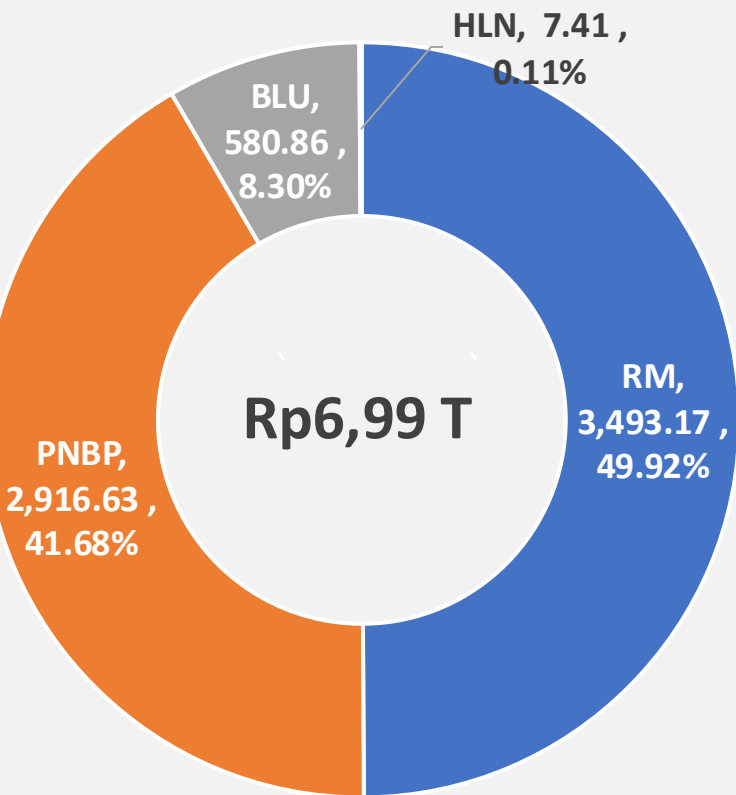
- 55 rekomendasi keprospekan SDA dan 23 usulan wilayah kerja.
- Pembangunan jaringan pemantauan air tanah sebanyak 50 titik sumur pantau
- Penentuan 276 situs warisan geologi (*Geoheritage*)
- Telah ditetapkan 10 Geopark Global UNESCO dan 10 Geopark Nasional
- Jumlah permohonan izin pengusahaan air tanah mencapai total 15.448 dari seluruh wilayah Indonesia dan telah berproses lebih dari 97%.

Pengembangan SDM

- Diklat Industri: 32.044 orang
- Diklat ASN: 19.730 orang
- Sertifikasi Kompetensi: 31.269 orang
- Diklat Masyarakat: 1.629 orang
- Jumlah Mahasiswa: 1.530 orang

Pagu dan Realisasi Alokasi Anggaran KESDM TA 2024

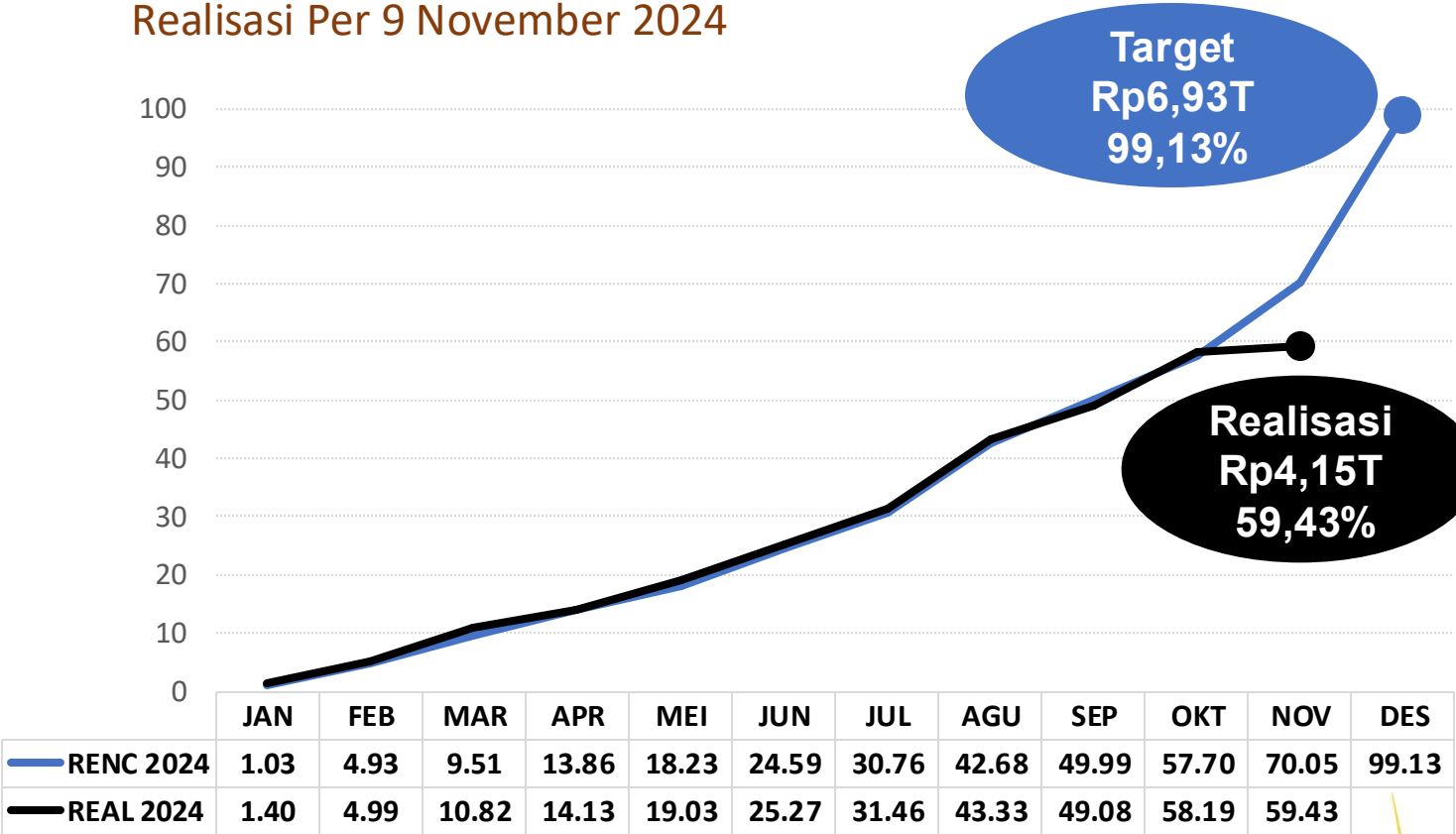
Sumber Dana (Rp Miliar)



Keterangan:

- 1. HLN (Hibah Luar Negeri) berupa kegiatan MTRE 3 dari UNDP yang telah dilaksanakan di Ditjen EBTKE periode 2019-2024.

Realisasi Per 9 November 2024



Sisa Realisasi Anggaran

- 1. Outstanding kontrak: **Rp1,359T**
- 2. Belanja pegawai, operasional perkantoran dan kegiatan non operasional non kontrak (termasuk e-proc) **Rp1,287T**



II.

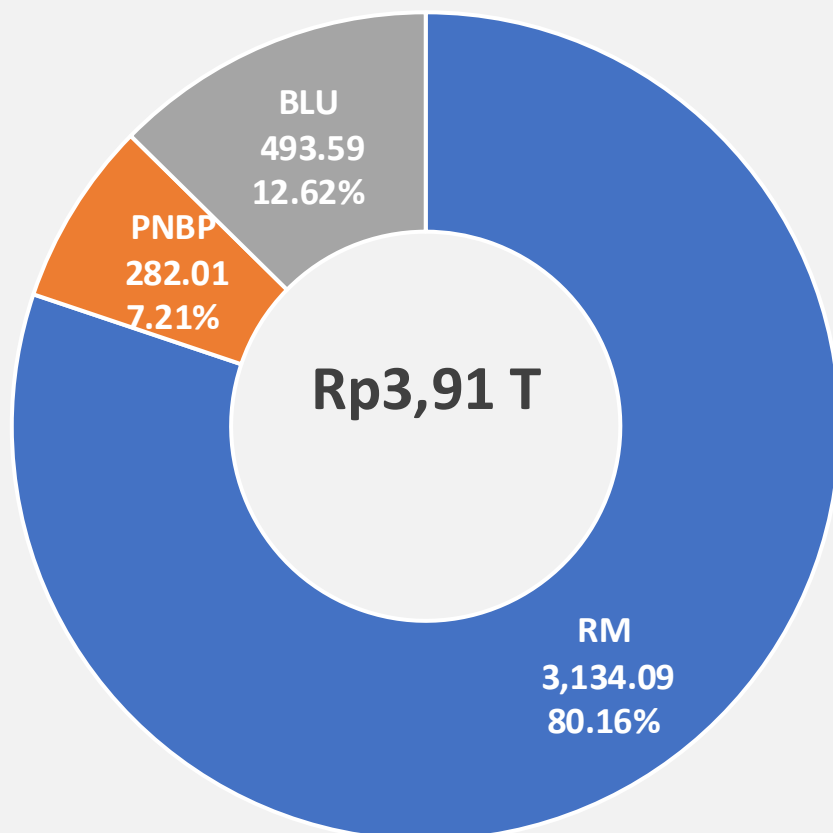
Program Strategis/ Prioritas TA 2025





Pagu Awal Alokasi Anggaran KESDM TA 2025

Sumber Dana







Per Unit Eselon I

Dalam Miliar Rupiah

UNIT	RM			PNBP			BLU	TOTAL
	001	002	NonOps	001	002	NonOps		
01-Setjen	118,1	90,6	127,4	-	-	-	-	336,1
02-Itjen	33,1	17,4	44,8	-	-	-	-	95,4
03-Ditjen Migas	109,0	82,3	184,3	-	-	21,0	170,0	566,7
04-Ditjen Gatrik	47,0	30,4	380,5	-	-	-	-	457,9
05-Ditjen Minerba	200,4	88,1	48,6	-	-	-	32,5	369,6
06-Setjen DEN	24,9	14,1	24,8	-	-	-	-	63,8
07-BPSDM ESDM	75,6	101,0	181,6	-	-	4,8	254,8	617,9
08-Badan Geologi	170,2	129,1	170,6	-	-	1,0	18,2	489,0
09-BPH Migas	-	-	-	74,3	32,2	147,8	-	254,3
10-Ditjen EBTKE	68,5	51,2	429,2	-	-	-	18,1	567,0
11-BPMA	62,6	15,3	13,3	-	-	0,9	-	92,1
Total	909,4	619,6	1.605,1	74,3	32,2	175,5	493,6	3.909,7





Rencana Aksi KPI Kementerian ESDM TA 2025 (1/5)

Program	Deskripsi	Quick Wins (100 Hari)
 Peningkatan Lifting Migas	Upaya peningkatan produksi migas untuk mengurangi impor dan menjaga ketahanan energi	<ol style="list-style-type: none">1. RKepmen Insentif khusus proyek EOR2. RKepmen tentang Pengusahaan lapangan/struktur dan sumur idle Pertamina melalui Kerja Sama dengan Mitra3. Penawaran wilayah kerja migas baru sebanyak 6 wilayah kerja4. Penetapan PSN untuk proyek hulu dan hilir migas
 Pengembangan Biofuel	Peningkatan biodiesel dari B35 menuju B50/B60 dan pengembangan biogasoline melalui campuran bioetanol	<ol style="list-style-type: none">1. Implementasi Program Mandatori Biodiesel B40 per Januari 2025 (penetapan Kepmen dan Alokasi Volume BBN Jenis Biodiesel B40 tahun 2025)2. Penetapan Permen ESDM terkait Pengusahaan Bahan Bakar sebagai pengganti Permen ESDM No.32 Tahun 2008 (Pentahapan kewajiban minimal campuran Biodiesel, Bioethanol, bioavtur)
 Pembangunan Jargas	Peningkatan Jargas RT dalam rangka mengurangi impor LPG	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelesaian revisi Peraturan Presiden nomor 6 Tahun 2019 untuk mengakomodasi pola Jargas skema KPBU dan keterlibatan BLU2. Tersedianya data teknis (hasil FEED-DEDC) Pembangunan Jargas 100.000 SR untuk diusulkan pada APBN 2025
 Pembangunan Pabrik LPG	mendorong investasi pabrik LPG untuk memanfaatkan potensi gas C3 dan C4 yang ada	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi dan validasi data supply Kilang LPG eksisting2. Mapping Potensi Gas Bumi yang terdapat kandungan C3 dan C4 untuk diekstraksi LPG-nya3. Mapping kondisi kandungan C3 dan C4 pada pipa pengangkutan, namun perlu dimitigasi penurunan volume gas akibat ekstraksi kandungan C3 dan C44. Mapping Fraksi C3 dan C4 yang dapat didistilasi untuk produksi LPG





Rencana Aksi KPI Kementerian ESDM TA 2025 (2/5)

Program	Deskripsi	Quick Wins (100 Hari)
 Pengelolaan Subsidi Tepat Sasaran	Peningkatan ketepatan peyaluran subsidi dengan mekanisme yang tepat baik subsidi BBM, LPG maupun Listrik	<ol style="list-style-type: none">1. Updating data pemadanan pelanggan penerima subsidi listrik.2. Penyiapan skema transformasi subsidi listrik.3. Percepatan pengusulan revisi Perpres 104/2007 dan Perpres 38/20194. Percepatan penandatanganan PKS antara KESDM dan KUMKM dalam rangka pemadanan dan validasi data usaha mikro5. Percepatan Pengaturan Konsumen Pengguna JBT Minyak Solar dan Konsumen Pengguna JBKP (Permen ESDM ex revisi Perpres 191/2014).6. Pengendalian volume penyaluran JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi Darat.7. Penerbitan surat rekomendasi pembelian konsumen pengguna tertentu JBT Minyak Solar dan JBKP menggunakan aplikasi Xstar 100% pada wilayah tertentu (Kota Cirebon, Kab. Pati).8. Pemantauan Volume penyaluran JBT dan JBKP berkala menggunakan Dashboard.9. Peningkatan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP melalui kerjasama dengan pemda (Pemprov Sumatera Utara, Pemprov Sumatera Barat dan Pemprov Bali).
 Digitalisasi Proses Perizinan	Mendorong kepastian dan transparansi baik proses perizinan di Minerba, Migas, maupun Ketenagalistrikan dan EBT	<ol style="list-style-type: none">1. Launching Portal Minerba One di Januari 2025. Transformasi digital Ditjen Minerba dilakukan melalui pengembangan Aplikasi Minerba One.2. Integrasi perizinan PB UMKU tentang PSPE ke OSS BKPM (PP 5/2021 Integrasi Perizinan Panas Bumi untuk Menunjang Kegiatan Usaha)3. Lelang WKP dan daftar dan kemampuan produsen dalam negeri barang dan jasa panas bumi secara online melalui platform Genesis





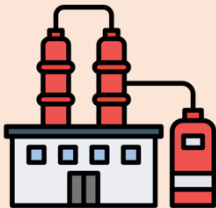

Rencana Aksi KPI Kementerian ESDM TA 2025 (3/5)

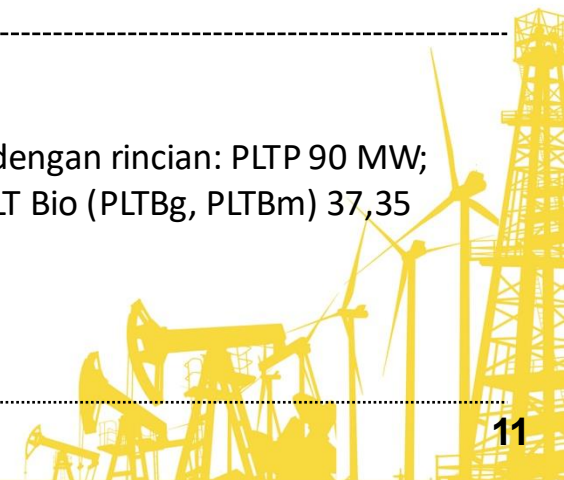
Program	Deskripsi	Quick Wins (100 Hari)
 Perbaikan Tata Kelola Perizinan Minerba	Perbaikan tata kelola termasuk Evaluasi izin yang sedang proses sengketa di PTUN demi pengelolaan SDA yang berkeadilan	<ol style="list-style-type: none">1. Usulan Kenaikan Tarif Royalti berupa iuran produksi untuk komoditas a.l. Nikel dan Emas melalui Revisi PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku di KESDM2. Revisi Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023 terkait RKAB dengan substansi sbb:<ol style="list-style-type: none">a. Pengaturan mengenai Perubahan RKAB sewaktu-waktub. Penyesuaian ketentuan mengenai larangan kegiatan bagi pemegang IUP/IUPK yang belum mendapatkan persetujuan RKAB3. Penghentian Pendaftaran IUP berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Pencabutan/Revisi Kepmen ESDM Nomor 297/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan dan Pendaftaran IUP4. Pengaturan kembali terkait pemberian WIUP/WIUPK secara prioritas dan lelang, termasuk kriteria Panitia Lelang dan Tim Penjamin Mutu, serta pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (<i>blacklist</i>) melalui Revisi Kepmen ESDM Nomor 258/2023 tentang Pedoman Pemberian WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara5. Penyampaian KPI Minerba untuk lebih dikenal publik
 Penegakan Hukum Tegas	Melalui Pembentukan Ditjen Gakkum untuk kasus <i>illegal mining, illegal drilling</i> , dan penyelewengan di lapangan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong percepatan pembentukan Ditjen Penegakan Hukum ESDM (Ditjen Gakkum ESDM)2. Mempersiapkan perangkat Ditjen Gakkum ESDM dalam masa transisi3. Proses pengisian perangkat Ditjen Gakkum ESDM










Rencana Aksi KPI Kementerian ESDM TA 2025 (4/5)

Program	Deskripsi	Quick Wins (100 Hari)
 Akselerasi Hilirisasi	Mengoptimalkan hilirisasi seluruh komoditas minerba dan migas sebagai salah 1 instrumen mencapai pertumbuhan 8%	<u>Minerba</u> <ol style="list-style-type: none">1. Sinkronisasi dan integrasi data dengan Kementerian terkait (Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi).2. Jaminan pasokan bahan mentah mineral untuk fasilitas smelter yang telah beroperasi.3. Pembentukan tim kajian evaluasi roadmap hilirisasi Batubara.4. Diversifikasi kegiatan pengembangan Batubara untuk pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian <u>melalui</u>: Revisi rancangan Permen terkait Pengenaan tarif Royalti 0%. <u>Ketenagalistrikan</u> <ol style="list-style-type: none">1. Updating Pemetaan Kebutuhan dan Pasokan Listrik di Proyek Hilirisasi2. Penyiapan skema untuk supporting listrik PLN atau Wilus <u>Migas</u> <ol style="list-style-type: none">1. FID dan tender EPC pembangunan pipa transmisi ruas WNTS-Pemping2. Basic design pipa transmisi ruas Sumatera Utara - Riau
 Pengembangan Energi Terbarukan	Pengembangan EBT untuk mengejar target bauran demi mencapai NZE pada tahun 2060	<ol style="list-style-type: none">1. Pengesahan RUKN2. Penetapan RUPTL PT PLN dan RUPTL Wilus Non PLN3. Tambahan Kapasitas Pembangkit Aneka sebesar 696,35 MW, dengan rincian: PLTP 90 MW; PLTA/M 310,4 MW; PLTS 140 MW; PLTS Atap 118,6 MW dan PLT Bio (PLTBg, PLTBm) 37,35 MW.4. Penyelesaian Roadmap optimalisasi produksi Listrik PLTP5. Revitalisasi Pembangkit EBT





Rencana Aksi KPI Kementerian ESDM TA 2025 (5/5)

Program	Deskripsi	Quick Wins (100 Hari)
 Pembangunan Energy Storage (Cadangan Penyangga Energi)	Pemerintah perlu menyiapkan cadangan CPE (Perpres 96/2024 tentang CPE)	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi Perpres CPE kepada K/L dan <i>stakeholder</i> terkait.2. Penyusunan konsep regulasi turunan Perpres CPE.3. Dimulainya pra FS
 Pengembangan Transmisi	Untuk mengakses potensi EBT di dan pemerataan akses listrik di wilayah Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Pemetaan Proyek Transmisi Prioritas Nasional dan2. Penyiapan skema pendanaan untuk pengembangan transmisi
 Dekarbonisasi Sektor ESDM	Upaya untuk mengurangi emisi CO ₂ dan Gas Rumah Kaca lainnya pada sektor pengguna energi	<ol style="list-style-type: none">1. RPermen CCS/CCUS2. Revisi Perpres 112/20223. Pengesahan Permen ESDM tentang Manajemen Energi4. Pengesahan Permen ESDM tentang konservasi energi
 Pengembangan SDM sektor ESDM	Mempersiapkan SDM agar berkontribusi optimal pada pengembangan sektor ESDM	Pengembangan SDM dalam rangka mendukung KPI melalui Pelatihan dan Sertifikasi sejumlah 8.080 Orang:
 Zero Temuan Material atas Hasil Pengawasan Internal	Menciptakan budaya tata kelola yang baik dan mengurangi risiko-risiko yang memengaruhi capaian organisasi dan untuk memastikan bahwa dalam setiap hasil pengawasan, tidak ada temuan material yang berdampak besar pada kualitas laporan keuangan, kepatuhan, maupun kinerja unit kerja.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan peran APIP (<i>Probity Audit</i>) dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa2. Pelaksanaan Audit Kinerja Secara Menyeluruh atas Pengawasan APIP3. Pelaksanaan audit pada obyek pengawasan berisiko tinggi4. Pengembangan Sistem Peringatan Dini dalam Smart Audit untuk Identifikasi Potensi Risiko Material terhadap Setiap Tahapan Proses Bisnis

Terima Kasih

📷 @kesdm

🐦 @KementerianESDM

🎵 @kementrianesdm

📘 Kementerian ESDM

📺 Kementerian ESDM

